

**DAMPAK STIGMATISASI KORBAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI POLRESTA
BUKITTINGGI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Universitas Andalas*

Oleh:



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2025

No.Reg : 29/PK-IV/IV/2025

DAMPAK STIGMATISASI KORBAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI POLRESTA BUKITTINGGI

Mifta Ajeng Azzahra, 2110112216, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 78 Halaman, Tahun 2025

ABSTRAK

Stigmatisasi negatif yang diterima oleh korban kekerasan seksual dapat berdampak pada korban baik secara psikologis maupun sosial. Selain itu, stigma negatif yang diberikan kepada korban juga dapat berdampak pada proses penegakan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana dampak stigmatisasi korban bagi penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di Polresta Bukittinggi, 2) Apa kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap korban di Polresta Bukittinggi, 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi dampak stigmatisasi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam proses penegakan hukum di Polresta Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak stigmatisasi korban terhadap penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di Polresta Bukittinggi berupa keengganan korban untuk melaporkan kasus sehingga adanya peluang terjadi kembali suatu tindak pidana kekerasan seksual serta kesulitan dalam pengumpulan keterangan sebagai bukti. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap korban yang mengalami stigma di Polresta Bukittinggi yaitu sulitnya memperoleh keterangan dari korban, kesulitan dalam pengumpulan keterangan saksi, dan kendala dalam kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi dampak stigmatisasi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam proses penegakan hukum di Polresta Bukittinggi terdiri dari upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif yang dilakukan Polresta Bukittinggi yaitu dengan memberikan rasa aman dan nyaman pada korban dan kerjasama dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak seperti UPTD PPA dan P2TP2A Bukittinggi. Sedangkan upaya preventif yang dilakukan oleh Polresta Bukittinggi yaitu dengan memberikan imbauan dan edukasi kepada masyarakat dan sekolah-sekolah. Saran terhadap penelitian ini adalah untuk aparat penegak hukum khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polresta Bukittinggi, diharapkan dapat memperkuat atau meningkatkan pendekatan dengan perspektif korban dalam menangani kasus kekerasan seksual. Kemudian antara aparat penegak hukum dengan pihak-pihak terkait khususnya lembaga pendidikan, diharapkan dapat memperkuat kerjasama dalam penanganan kasus kekerasan seksual, agar dapat memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban tindak pidana kekerasan seksual dan dapat meminimalisasi stigma negatif yang diterima korban.

Kata Kunci: Stigmatisasi, Kekerasan Seksual, Penegakan Hukum